

Greenwashing Laporan Keberlanjutan: Studi Literatur Sistematis Peran Akuntansi Keberlanjutan Menjamin Integritas Pengungkapan ESG

Ahmad Rio L¹

¹ Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia; email: 21402500002@std.unissula.ac.id

Article history

Submitted: 2026/04/18; Revised: 2026/05/15; Accepted: 2026/06/21

Abstract

Sustainability accounting evolved from the need to expand the accounting function, from simply measuring profit and financial position to an information system capable of explaining the economic, social, environmental and governance impacts of a company. This article aims to synthesize the role of sustainability accounting in reducing greenwashing risk and strengthening the integrity of environmental, social, and governance (ESG) disclosure in the era of IFRS S1 and IFRS S2. The study applies a systematic literature review by examining academic literature on sustainability accounting, ESG disclosure, greenwashing, sustainability assurance, carbon accounting, and official sustainability disclosure standards. The review indicates that greenwashing is not merely a communication problem, but an accountability problem arising from weak measurement, selective disclosure, fragmented data governance, and insufficient assurance. Sustainability accounting contributes to ESG integrity by providing measurable indicators, documentation trails, boundary setting, materiality assessment, and linkage between sustainability risks and financial consequences. IFRS S1 and IFRS S2 strengthen decision-useful sustainability-related financial disclosure, while GRI and sustainability assurance standards complement the broader impact and credibility dimensions. The article proposes four pillars of ESG disclosure integrity: data governance, measurement quality, standards alignment, and independent assurance. The study concludes that sustainability accounting should move beyond symbolic reporting and become a control mechanism that ensures ESG claims are verifiable, comparable, and accountable.

Keywords

ESG Disclosure, Greenwashing, IFRS, Sustainability Accounting, Sustainability Assurance.



© 2026 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Akuntansi keberlanjutan berkembang dari kebutuhan untuk memperluas fungsi akuntansi, dari sekadar mengukur laba dan posisi keuangan menjadi sistem informasi yang mampu menjelaskan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Perubahan ini terjadi karena laporan keuangan konvensional tidak selalu memadai untuk menjawab pertanyaan tentang emisi karbon, penggunaan energi, risiko iklim, relasi dengan masyarakat, hak pekerja, rantai pasok, dan kualitas tata kelola. Dalam konteks tersebut, akuntansi keberlanjutan tidak boleh dipahami sebagai tambahan narasi

dalam laporan tahunan, tetapi sebagai proses pengukuran, pencatatan, pengendalian, dan pelaporan informasi keberlanjutan yang dapat diuji.

Masalah utama yang muncul dalam praktik pelaporan keberlanjutan adalah greenwashing. Greenwashing terjadi ketika organisasi membangun citra ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial, tetapi klaim tersebut tidak didukung oleh data, tindakan, pengukuran, atau bukti yang memadai. Dalam konteks pelaporan ESG, greenwashing dapat muncul melalui pengungkapan selektif, penggunaan bahasa yang kabur, penekanan berlebihan pada program kecil, penghilangan informasi negatif, atau penyajian target keberlanjutan tanpa indikator pencapaian yang jelas. Dengan kata lain, greenwashing bukan hanya persoalan komunikasi pemasaran, melainkan persoalan akuntabilitas informasi.

Isu ini menjadi semakin penting setelah lahirnya IFRS Sustainability Disclosure Standards, terutama IFRS S1 tentang persyaratan umum pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan serta IFRS S2 tentang pengungkapan terkait iklim. IFRS S1 menuntut entitas mengungkapkan informasi keberlanjutan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan umum dalam membuat keputusan penyediaan sumber daya. IFRS S2 memperdalam tuntutan tersebut pada aspek iklim, termasuk tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Perubahan ini menunjukkan bahwa informasi keberlanjutan bergerak menuju standar global yang lebih terstruktur dan terkait langsung dengan konsekuensi keuangan.

Di Indonesia, relevansi topik ini semakin kuat karena Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia telah meratifikasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 melalui PSPK 1 dan PSPK 2. Standar tersebut menandai pergeseran penting: pelaporan keberlanjutan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai formalitas reputasi, tetapi harus didukung sistem akuntansi, tata kelola data, dan mekanisme assurance. Dengan demikian, profesi akuntansi menghadapi tuntutan baru untuk menjamin kualitas informasi non-keuangan yang semakin menentukan kepercayaan investor, regulator, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun literatur tentang ESG dan pelaporan keberlanjutan terus berkembang, masih terdapat celah kajian mengenai bagaimana akuntansi keberlanjutan secara spesifik dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap greenwashing. Banyak studi membahas hubungan pengungkapan ESG dengan nilai perusahaan, kinerja keuangan, atau legitimasi perusahaan, tetapi belum cukup menekankan fungsi akuntansi sebagai sistem yang menjamin integritas data. Padahal, integritas pengungkapan ESG tidak mungkin dicapai hanya melalui standar pelaporan; ia membutuhkan pengukuran yang konsisten, dokumentasi sumber data, batas pelaporan yang jelas, materialitas yang dapat dijelaskan, serta assurance yang independen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan studi literatur sistematis mengenai peran akuntansi keberlanjutan dalam mencegah greenwashing dan menjamin integritas pengungkapan ESG di era IFRS S1 dan S2. Fokus utama artikel ini meliputi: bentuk-bentuk greenwashing dalam laporan keberlanjutan, kontribusi akuntansi keberlanjutan terhadap kualitas data ESG, implikasi IFRS S1 dan S2 terhadap praktik pelaporan, serta agenda riset masa depan untuk konteks Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis atau *systematic literature review*. Metode ini dipilih karena tujuan artikel bukan untuk menguji pengaruh antarvariabel secara statistik, melainkan untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis pengetahuan ilmiah yang telah berkembang mengenai greenwashing, akuntansi keberlanjutan, pengungkapan ESG, IFRS S1, IFRS S2, dan *sustainability assurance*. Studi literatur sistematis memungkinkan peneliti membangun

pemahaman konseptual yang lebih terarah serta menemukan celah penelitian yang relevan untuk dikembangkan pada studi empiris berikutnya.

Sumber literatur dalam artikel ini terdiri atas artikel ilmiah, buku akademik, dokumen standar internasional, serta dokumen kebijakan yang relevan. Literatur akademik diprioritaskan dari bidang akuntansi, pelaporan keberlanjutan, tata kelola, audit, ESG, dan etika bisnis. Dokumen standar yang digunakan antara lain IFRS S1, IFRS S2, GRI Standards, ISSA 5000, GHG Protocol, TCFD, dan Standar Pengungkapan Keberlanjutan Indonesia. Literatur klasik yang terbit sebelum 2019 tetap digunakan apabila memiliki pengaruh konseptual penting, misalnya literatur tentang triple bottom line, legitimasi, greenwashing, dan assurance keberlanjutan.

Prosedur kajian dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi literatur menggunakan kata kunci berbahasa Inggris dan Indonesia, seperti sustainability accounting, greenwashing, ESG disclosure, sustainability reporting, IFRS S1, IFRS S2, sustainability assurance, carbon accounting, integritas data ESG, dan laporan keberlanjutan. Kedua, penyaringan dilakukan dengan membaca judul, abstrak, dan kata kunci untuk memastikan keterkaitan dengan fokus artikel. Ketiga, kelayakan literatur diuji berdasarkan relevansi isi, kejelasan argumen, konteks akuntansi, serta kontribusinya terhadap pemahaman greenwashing dan integritas pengungkapan ESG. Keempat, literatur yang memenuhi kriteria dianalisis secara tematik.

Kriteria inklusi dalam studi ini meliputi: literatur yang membahas akuntansi keberlanjutan, kualitas pengungkapan ESG, greenwashing, standar pelaporan keberlanjutan, assurance, dan tata kelola data ESG; literatur yang memiliki kontribusi konseptual atau empiris terhadap akuntabilitas pelaporan; serta dokumen standar resmi yang menjadi rujukan praktik pelaporan keberlanjutan. Kriteria eksklusi meliputi: artikel yang hanya membahas pemasaran hijau tanpa kaitan dengan akuntansi atau pelaporan, tulisan populer tanpa dasar akademik, publikasi yang tidak memiliki informasi metodologis, dan literatur yang tidak relevan dengan pengungkapan ESG.

Teknik analisis data menggunakan sintesis tematik. Literatur yang telah dipilih dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: greenwashing sebagai masalah akuntabilitas, peran akuntansi keberlanjutan dalam pengukuran ESG, pergeseran standar pelaporan melalui IFRS S1 dan S2, pentingnya assurance keberlanjutan, serta peluang dan risiko digitalisasi dalam pelaporan ESG. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk membangun model konseptual mengenai pilar integritas pengungkapan ESG.

Tabel 1. Protokol Studi Literatur Sistematis

Komponen	Penjelasan
Desain penelitian	Studi literatur sistematis dengan sintesis tematik.
Fokus kajian	Greenwashing, akuntansi keberlanjutan, pengungkapan ESG, IFRS S1, IFRS S2, dan sustainability assurance.
Sumber data	Artikel ilmiah, buku akademik, standar internasional, dan dokumen kebijakan terkait pelaporan keberlanjutan.
Kata kunci	Sustainability accounting, greenwashing, ESG disclosure, sustainability reporting, IFRS S1, IFRS S2, sustainability assurance, carbon accounting.
Kriteria inklusi	Literatur yang relevan dengan akuntansi, pelaporan ESG, integritas data, standar keberlanjutan, dan assurance.
Kriteria eksklusi	Literatur yang hanya membahas pemasaran hijau tanpa kaitan dengan akuntansi atau pengungkapan ESG.

Teknik analisis

Klasifikasi tema, perbandingan konsep, sintesis kritis, dan penyusunan agenda riset.

Sumber: Diolah penulis, 2026.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Greenwashing sebagai Masalah Akuntabilitas Pengungkapan

Literatur menunjukkan bahwa greenwashing muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara klaim keberlanjutan dan tindakan nyata perusahaan. Dalam laporan keberlanjutan, greenwashing tidak selalu hadir dalam bentuk kebohongan eksplisit. Ia lebih sering muncul secara halus melalui pemilihan informasi yang menguntungkan, penghilangan dampak negatif, penggunaan istilah normatif tanpa indikator, serta penyajian program sosial atau lingkungan yang tidak material tetapi diberi ruang narasi besar. Praktik seperti ini menjadikan laporan keberlanjutan sebagai alat pencitraan, bukan alat akuntabilitas.

Dari perspektif akuntansi, greenwashing dapat dipahami sebagai kegagalan sistem informasi keberlanjutan. Ketika data emisi, konsumsi energi, limbah, risiko sosial, atau praktik tata kelola tidak dikumpulkan secara konsisten, maka laporan ESG akan bergantung pada narasi manajerial. Narasi tersebut mudah diarahkan untuk membangun citra positif. Oleh karena itu, inti persoalan greenwashing bukan hanya apakah perusahaan memiliki kegiatan keberlanjutan, melainkan apakah informasi yang dilaporkan dapat ditelusuri sumbernya, diukur metodenya, dibandingkan antarperiode, dan diuji oleh pihak independen.

Greenwashing juga berkaitan dengan teori legitimasi. Perusahaan cenderung menggunakan laporan keberlanjutan untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi sosial, terutama ketika aktivitas bisnisnya memiliki risiko lingkungan dan sosial yang tinggi. Pada situasi ini, laporan keberlanjutan dapat menjadi mekanisme simbolik untuk menunjukkan kepatuhan, meskipun substansi perubahan operasional belum memadai. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa standar pelaporan saja tidak cukup. Tanpa mekanisme akuntansi dan assurance, laporan keberlanjutan berisiko berubah menjadi dokumen retorik.

Peran Akuntansi Keberlanjutan dalam Menjamin Integritas ESG

Akuntansi keberlanjutan berperan sebagai fondasi pengendalian informasi ESG. Peran ini mencakup penentuan batas pelaporan, identifikasi indikator yang material, pengukuran data kuantitatif dan kualitatif, dokumentasi bukti, konsolidasi data antarunit, serta penyusunan informasi yang dapat dibandingkan. Tanpa akuntansi keberlanjutan, ESG hanya menjadi kumpulan klaim normatif yang sulit diverifikasi. Dengan akuntansi keberlanjutan, klaim keberlanjutan harus dikaitkan dengan data, prosedur, dan pertanggungjawaban.

Dalam praktiknya, integritas pengungkapan ESG dapat dilihat dari empat karakteristik. Pertama, keterukuran, yaitu informasi ESG memiliki indikator yang jelas dan metode penghitungan yang konsisten. Kedua, keterlacakan, yaitu setiap angka dan klaim dapat ditelusuri ke dokumen, sistem, atau sumber data tertentu. Ketiga, keterbandingan, yaitu informasi dapat dibandingkan antarperiode, antarperusahaan, atau antarsektor. Keempat, keterujian, yaitu informasi dapat diperiksa oleh auditor, assurance provider, regulator, atau pemangku kepentingan lain.

Akuntansi keberlanjutan juga berperan dalam menghubungkan informasi ESG dengan konsekuensi finansial. Risiko iklim, biaya energi, kewajiban lingkungan, risiko reputasi, gangguan rantai pasok, dan risiko regulasi dapat memengaruhi arus kas, biaya modal, nilai aset, serta kelangsungan usaha. Dengan demikian, informasi keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari akuntansi

keuangan. Era IFRS S1 dan S2 memperkuat logika ini karena informasi keberlanjutan harus dikaitkan dengan risiko dan peluang yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

IFRS S1 dan IFRS S2: Penguatan Standar atau Penyempitan Perspektif?

IFRS S1 dan IFRS S2 memberikan kerangka baru bagi pelaporan keberlanjutan berbasis informasi yang berguna bagi keputusan ekonomi. IFRS S1 mengatur persyaratan umum pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan, sedangkan IFRS S2 berfokus pada pengungkapan terkait iklim. Keduanya mengadopsi struktur inti berupa tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Struktur ini penting karena memaksa perusahaan menjelaskan tidak hanya apa yang dicapai, tetapi juga bagaimana risiko keberlanjutan diawasi, dikelola, dan diintegrasikan ke dalam strategi bisnis.

Kelebihan IFRS S1 dan S2 adalah kemampuannya mendorong keterbandingan global dan menghubungkan isu keberlanjutan dengan pelaporan keuangan. Dalam konteks pasar modal, standar ini membantu investor memahami risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Hal ini dapat mengurangi ruang greenwashing karena perusahaan tidak cukup hanya menyatakan komitmen, tetapi perlu menunjukkan metrik, target, strategi, dan dampaknya terhadap prospek bisnis.

Namun, terdapat kritik penting. Pendekatan IFRS Sustainability Standards cenderung berorientasi pada materialitas finansial, yaitu informasi keberlanjutan yang memengaruhi keputusan investor dan nilai perusahaan. Perspektif ini kuat untuk pasar modal, tetapi dapat menyempitkan perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan yang tidak segera terlihat secara finansial. Oleh karena itu, IFRS S1 dan S2 sebaiknya tidak dibaca sebagai pengganti GRI atau pendekatan materialitas ganda, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pelaporan yang perlu dikombinasikan dengan standar dampak dan prinsip akuntabilitas sosial-lingkungan.

Bagi Indonesia, penerapan SPK berbasis IFRS S1 dan S2 akan menuntut kesiapan yang lebih serius. Perusahaan tidak hanya perlu menyesuaikan format laporan, tetapi juga membangun sistem data internal, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarbagian, dan mekanisme assurance. Jika kesiapan ini lemah, standar baru justru dapat menghasilkan kepatuhan formal yang tetap membuka ruang greenwashing.

Sustainability Assurance sebagai Mekanisme Pengendalian Greenwashing

Assurance laporan keberlanjutan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kredibilitas informasi ESG. Assurance memberikan keyakinan terbatas atau memadai bahwa informasi keberlanjutan telah disusun berdasarkan kriteria tertentu dan bebas dari salah saji material. Dalam konteks greenwashing, assurance dapat mengurangi kesenjangan antara klaim keberlanjutan dan bukti yang mendasarinya. Namun, efektivitas assurance bergantung pada ruang lingkup pemeriksaan, kompetensi pemberi assurance, independensi, serta kualitas sistem data yang diperiksa.

Lahirnya ISSA 5000 menunjukkan bahwa assurance keberlanjutan bergerak menuju standar global yang lebih konsisten. Standar ini penting karena informasi keberlanjutan memiliki karakteristik berbeda dari informasi keuangan. Data ESG sering berasal dari banyak unit, menggunakan satuan pengukuran yang beragam, melibatkan estimasi, dan sering kali bergantung pada data pihak ketiga atau rantai pasok. Karena itu, assurance keberlanjutan tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan audit keuangan tradisional; ia membutuhkan pemahaman atas proses bisnis, sains iklim, pengukuran emisi, risiko sosial, serta tata kelola data.

Meski demikian, assurance tidak otomatis menghapus greenwashing. Assurance dengan ruang lingkup terbatas, hanya memeriksa sebagian indikator, atau hanya berfokus pada kesesuaian

prosedural dapat menciptakan legitimasi semu. Risiko ini meningkat ketika perusahaan menggunakan label assurance untuk memperkuat reputasi tanpa membuka metodologi, keterbatasan, dan cakupan pemeriksaan secara transparan. Oleh sebab itu, assurance harus dipahami sebagai bagian dari ekosistem integritas, bukan sekadar tanda formal pada laporan keberlanjutan.

Digitalisasi, AI, dan Risiko Baru dalam Pelaporan ESG

Digitalisasi dan kecerdasan buatan membuka peluang baru dalam akuntansi keberlanjutan. Teknologi dapat membantu mengumpulkan data energi, emisi, limbah, keselamatan kerja, rantai pasok, serta menganalisis laporan keberlanjutan dalam jumlah besar. AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi pola bahasa greenwashing, membandingkan klaim perusahaan dengan data eksternal, serta mengidentifikasi inkonsistensi antarbagian laporan. Dengan demikian, teknologi dapat memperkuat fungsi pengendalian informasi ESG.

Namun, AI juga membawa risiko baru. Sistem otomatis dapat menghasilkan laporan yang tampak rapi tetapi tidak akurat, menggunakan asumsi proksi yang tidak sesuai, atau mengulang bias dari data pelatihan. Dalam konteks ESG, risiko ini serius karena laporan keberlanjutan berkaitan dengan kepercayaan publik dan kepatuhan regulasi. Jika data yang digunakan tidak valid, maka AI hanya mempercepat produksi greenwashing dalam bentuk yang lebih canggih. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pelaporan ESG harus disertai pengawasan manusia, dokumentasi metodologi, validasi data, dan kontrol internal yang kuat.

Akuntansi keberlanjutan memiliki posisi strategis dalam mengelola risiko digital tersebut. Akuntan tidak cukup hanya menjadi penyusun laporan, tetapi harus menjadi penjaga kualitas data keberlanjutan. Fungsi ini mencakup penilaian sumber data, desain kontrol, pemeriksaan konsistensi, pengujian asumsi, serta penjaminan bahwa output digital tidak menggantikan pertanggungjawaban manajerial.

Tabel 2. Sintesis Tematik Literatur Greenwashing dan Akuntansi Keberlanjutan

Tema	Temuan Utama	Implikasi bagi Akuntansi Keberlanjutan
Greenwashing	Klaim keberlanjutan sering bersifat selektif, kabur, dan tidak selalu didukung bukti.	Diperlukan pengukuran, dokumentasi, dan kontrol atas klaim ESG.
Kualitas Pengungkapan ESG	Informasi ESG berkualitas jika relevan, lengkap, dapat dibandingkan, dan dapat diuji.	Akuntansi harus menyediakan indikator, batas pelaporan, dan metode perhitungan yang konsisten.
IFRS S1 dan S2	Standar memperkuat pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan yang berdampak finansial.	Perusahaan perlu menghubungkan data ESG dengan strategi, risiko, metrik, dan prospek keuangan.
Assurance	Assurance meningkatkan kredibilitas, tetapi efektivitasnya bergantung pada cakupan dan independensi.	Akuntan perlu memperkuat kesiapan bukti, sistem data, dan kontrol internal.

Digitalisasi dan AI	AI membantu analisis ESG tetapi berisiko menghasilkan laporan otomatis yang tidak akurat.	Diperlukan tata kelola data, validasi, dan human oversight.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Sumber: Diolah penulis, 2026.

Model Konseptual Integritas Pengungkapan ESG

Berdasarkan sintesis literatur, integritas pengungkapan ESG dapat dibangun melalui empat pilar. Pilar pertama adalah tata kelola data ESG. Perusahaan harus memiliki struktur tanggung jawab yang jelas mengenai siapa yang mengumpulkan, memvalidasi, menyetujui, dan melaporkan data keberlanjutan. Tanpa tata kelola data, laporan keberlanjutan akan rentan terhadap inkonsistensi dan klaim yang tidak dapat ditelusuri.

Pilar kedua adalah kualitas pengukuran. Informasi ESG harus disusun dengan indikator yang jelas, satuan ukur yang konsisten, metode perhitungan yang terdokumentasi, dan batas pelaporan yang tegas. Dalam carbon accounting, misalnya, perusahaan perlu menjelaskan cakupan emisi, sumber faktor emisi, metode estimasi, dan keterbatasan data. Tanpa kualitas pengukuran, angka ESG dapat menjadi simbol kuantitatif yang tampak ilmiah tetapi lemah secara akuntabilitas.

Pilar ketiga adalah keselarasan standar. IFRS S1 dan S2 penting untuk menghubungkan informasi keberlanjutan dengan keputusan investor dan risiko finansial, sedangkan GRI membantu melihat dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Kombinasi keduanya memberikan keseimbangan antara materialitas finansial dan dampak keberlanjutan yang lebih luas. Perusahaan yang hanya memilih standar secara oportunistik berisiko memperkuat greenwashing.

Pilar keempat adalah assurance independen. Assurance dibutuhkan untuk menguji apakah informasi yang dilaporkan didukung bukti dan disusun berdasarkan kriteria yang jelas. Namun, assurance harus transparan mengenai ruang lingkup, tingkat keyakinan, standar yang digunakan, dan keterbatasan pemeriksaan. Assurance yang sempit dan tidak transparan dapat menciptakan kesan kredibel tanpa benar-benar meningkatkan integritas informasi.

Tabel 3. Pilar Integritas Pengungkapan ESG di Era IFRS S1 dan S2

Pilar	Fokus	Risiko Jika Lemah
Tata kelola data	Penanggung jawab, alur validasi, kontrol internal, dan dokumentasi sumber data.	Data ESG terfragmentasi, tidak konsisten, dan sulit diaudit.
Kualitas pengukuran	Indikator, satuan ukur, batas pelaporan, metode perhitungan, dan konsistensi antarperiode.	Klaim ESG menjadi naratif dan tidak dapat diuji.
Keselarasan standar	Kombinasi IFRS S1/S2, GRI, GHG Protocol, dan standar relevan lainnya.	Pelaporan menjadi cherry-picking dan berisiko greenwashing.
Assurance independen	Pemeriksaan bukti, cakupan, tingkat keyakinan, dan transparansi keterbatasan.	Assurance hanya menjadi simbol legitimasi.

Sumber: Diolah penulis, 2026.

Agenda Riset Masa Depan

Studi ini menemukan beberapa agenda riset yang penting. Pertama, penelitian empiris di Indonesia perlu menguji sejauh mana penerapan SPK berbasis IFRS S1 dan S2 mampu meningkatkan kualitas pengungkapan ESG. Riset dapat membandingkan laporan keberlanjutan sebelum dan sesudah penerapan SPK, terutama pada perusahaan sektor energi, pertambangan, perkebunan, manufaktur, dan keuangan yang memiliki eksposur lingkungan dan sosial tinggi.

Kedua, riset tentang greenwashing perlu bergerak dari analisis narasi menuju analisis kesenjangan antara klaim dan kinerja. Peneliti dapat membandingkan klaim ESG dalam laporan keberlanjutan dengan data emisi, sanksi lingkungan, konflik sosial, kecelakaan kerja, atau temuan audit. Pendekatan ini lebih kuat karena greenwashing tidak hanya dinilai dari kata-kata, tetapi dari ketidaksesuaian antara pernyataan dan bukti.

Ketiga, penelitian tentang sustainability assurance perlu diperluas. Fokus penting meliputi perbedaan antara assurance oleh Kantor Akuntan Publik dan penyedia assurance non-akuntan, pengaruh tingkat assurance terhadap kepercayaan investor, serta hubungan antara assurance dan penurunan risiko greenwashing. Riset ini semakin relevan menjelang penerapan ISSA 5000.

Keempat, digitalisasi pelaporan ESG dan penggunaan AI menjadi agenda baru. Penelitian dapat menguji apakah AI benar-benar meningkatkan kualitas analisis laporan keberlanjutan atau justru memperbesar risiko laporan otomatis yang menyesatkan. Akuntansi keberlanjutan perlu masuk ke area ini karena masa depan pelaporan ESG akan sangat ditentukan oleh kualitas data digital.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa greenwashing dalam laporan keberlanjutan bukan sekadar persoalan bahasa promosi, melainkan persoalan integritas akuntansi dan akuntabilitas data. Greenwashing terjadi ketika klaim ESG tidak didukung oleh pengukuran, bukti, kontrol internal, dan assurance yang memadai. Dalam konteks tersebut, akuntansi keberlanjutan memiliki peran strategis untuk mengubah laporan keberlanjutan dari dokumen reputasi menjadi instrumen pertanggungjawaban.

Peran akuntansi keberlanjutan dalam menjamin integritas pengungkapan ESG terletak pada kemampuannya membangun sistem pengukuran, dokumentasi, keterlacakan, keterbandingan, dan keterujian informasi. IFRS S1 dan S2 memperkuat kebutuhan tersebut dengan menempatkan informasi keberlanjutan sebagai bagian dari informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Namun, standar berbasis materialitas finansial perlu dilengkapi dengan perspektif dampak yang lebih luas, seperti yang dikembangkan dalam GRI dan kerangka pelaporan keberlanjutan lainnya.

Sustainability assurance, terutama dengan hadirnya ISSA 5000, menjadi mekanisme penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan. Akan tetapi, assurance harus dilihat secara kritis. Ia hanya efektif jika didukung ruang lingkup yang memadai, independensi, transparansi, dan sistem data yang kuat. Tanpa itu, assurance dapat berubah menjadi simbol legitimasi baru yang tidak jauh berbeda dari greenwashing.

Secara praktis, perusahaan perlu membangun empat pilar integritas pengungkapan ESG, yaitu tata kelola data, kualitas pengukuran, keselarasan standar, dan assurance independen. Secara akademik, artikel ini membuka ruang penelitian lanjutan tentang penerapan SPK di Indonesia, pengukuran risiko greenwashing, efektivitas assurance, carbon accounting, dan penggunaan AI dalam pelaporan ESG. Dengan demikian, masa depan akuntansi keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun laporan, tetapi oleh kemampuan menjamin bahwa setiap klaim keberlanjutan dapat dibuktikan.

REFERENSI

- Boiral, O. (2013). Sustainability reports as simulacra? A counter-account of A and A+ GRI reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(7), 1036-1071. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2012-00998>
- Bronzini, M., Nicolini, C., Lepri, B., Passerini, A., & Staiano, J. (2023). Glitter or gold? Deriving structured insights from sustainability reports via large language models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2310.05628>
- Cho, C. H., Guidry, R. P., Hageman, A. M., & Patten, D. M. (2012). Do actions speak louder than words? An empirical investigation of corporate environmental reputation. *Accounting, Organizations and Society*, 37(1), 14-25. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.12.001>
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: Economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, 26, 1176-1248. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G. D., & Vasvari, F. P. (2008). Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure. *Accounting, Organizations and Society*, 33(4-5), 303-327. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.05.003>
- de Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., & Soares, G. R. L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. *Environmental Sciences Europe*, 32, 19. <https://doi.org/10.1186/s12302-020-0300-3>
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64-87. <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>
- Dumay, J., Bernardi, C., Guthrie, J., & Demartini, P. (2016). Integrated reporting: A structured literature review. *Accounting Forum*, 40(3), 166-185. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.06.001>
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835-2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI standards. GRI. <https://www.globalreporting.org/standards/>
- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability... and how would we know? *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47-62. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.04.006>
- Greenhouse Gas Protocol. (2004). *A corporate accounting and reporting standard: Revised edition*. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development.
- Greenhouse Gas Protocol. (2011). *Corporate value chain (Scope 3) accounting and reporting standard*. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development.
- Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and opportunities. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5-21. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005>
- IAASB. (2024). *International Standard on Sustainability Assurance 5000, General Requirements for Sustainability Assurance Engagements*. International Auditing and Assurance Standards Board.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Indonesia launches Sustainability Disclosure Standards based on IFRS S1 and S2*. Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia.
- IFRS Foundation. (2023a). *IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. International Sustainability Standards Board.

- IFRS Foundation. (2023b). IFRS S2 Climate-related Disclosures. International Sustainability Standards Board.
- KPMG. (2024). The move to mandatory reporting: Survey of sustainability reporting 2024. KPMG International.
- Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under threat of audit. *Journal of Economics & Management Strategy*, 20(1), 3-41. <https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2010.00282.x>
- Marquis, C., Toffel, M. W., & Zhou, Y. (2016). Scrutiny, norms, and selective disclosure: A global study of greenwashing. *Organization Science*, 27(2), 483-504. <https://doi.org/10.1287/orsc.2015.1039>
- Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 59-78. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.10.003>
- Milne, M. J., & Gray, R. (2013). W(h)ither ecology? The triple bottom line, the Global Reporting Initiative, and corporate sustainability reporting. *Journal of Business Ethics*, 118(1), 13-29. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1543-8>
- Ong, K., Mao, R., Varshney, D., Cambria, E., & Mengaldo, G. (2025). Towards robust ESG analysis against greenwashing risks: Aspect-action analysis with cross-category generalization. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2502.15821>
- Simnett, R., Vanstraelen, A., & Chua, W. F. (2009). Assurance on sustainability reports: An international comparison. *The Accounting Review*, 84(3), 937-967. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.937>
- Sundarasan, S., Tuan Mat, T. Z., Rajangam, N., & Rajagopalan, U. (2024). Sustainability reporting and greenwashing: A bibliometrics analysis. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2320812. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2320812>
- Sun, S., Wu, B. P., Jin, M., Bai, P., Zhang, H., & Song, X. (2026). ESG-Bench: Benchmarking long-context ESG reports for hallucination mitigation. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2603.13154>
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (2017). Final report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Financial Stability Board.
- United Nations. (2024). Greenwashing - the deceptive tactics behind environmental claims. United Nations Climate Action. <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/greenwashing>